

LAPORAN KEUANGAN

**Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Palu**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2020



BAGIAN ANGGARAN 015



LAPORAN KEUANGAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UAKPA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG PALU
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020
*Audited***

*JALAN PROF. MOH. YAMIN NO.55 , PALU SELATAN
KOTA PALU*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020
Audited



UAKPA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Pusat. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 28 April 2021

Kepala Kantor,



Devi Lesilolo

NIP 196503031985031001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 19 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 24 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 28 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 33 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 35 |
| VI. Lampiran dan Daftar | |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 28 April 2021

Kepala Kantor,



Devi Lesilolo

NIP 196503031985031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Semester II Tahun Anggaran 2020 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.466.005.883 atau mencapai 124% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.987.922.000

Realisasi Belanja Negara Semester II TA 2020 adalah sebesar Rp2.829.162.473 atau mencapai 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.137.609.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp48.718.036.951,6 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp39.762.606,6 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp48.661.735.747 serta Aset Lainnya sebesar Rp16.538.598.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,6 dan Rp48.718.036.952.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.400.119.509 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.239.943.135 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp839.823.626), Kegiatan Non Operasional surplus

Rp67.132.211 dan Pos-Pos Luar Biasa tidak ada realisasi, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp774.648.065).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp49.012.909.444 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp774.648.065), ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp479.775.572 dan dikurangi Penurunan Ekuitas sebesar (Rp294.872.493) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp48.718.036.951.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2020 | | % thd Angg | 31 Desember 2019 |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 1.987.922.000 | 2.466.005.883 | 124 | 2.558.297.674 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.987.922.000 | 2.466.005.883 | 124 | 2.558.297.674 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Negara | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.2 | 1.084.014.000 | 1.056.682.689 | 97 | 1.615.229.685 |
| Belanja Barang | B.3 | 1.753.395.000 | 1.472.279.784 | 84 | 1.662.755.057 |
| Belanja Modal | B.4 | 300.200.000 | 300.200.000 | 100 | 4.654.180.947 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 3.137.609.000 | 2.829.162.473 | 90 | 7.932.165.689 |
| JUMLAH BELANJA | | 3.137.609.000 | 2.829.162.473 | 90 | 7.932.165.689 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PALU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1 | 1.245.837 | 0 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.2 | 0,6 | 11.293.585 |
| Persediaan | C.3 | 38.516.769 | 29.650.839 |
| Jumlah Aset Lancar | | 39.762.606,6 | 40.944.424 |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.4 | 37.936.460.000 | 37.936.460.000 |
| Peralatan dan Mesin | C.5 | 4.309.319.172 | 5.251.053.810 |
| Gedung dan Bangunan | C.6 | 9.764.137.730 | 9.764.137.730 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.7 | 324.878.000 | 324.878.000 |
| Aset Tetap Lainnya | C.8 | 4.940.000 | 4.940.000 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.9 | (3.677.999.155) | (4.279.987.915) |
| Jumlah Aset Tetap | | 48.661.735.747 | 49.001.481.625 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Lain-lain | C.10 | 1.210.393.222 | 639.219.596 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.11 | (1.193.854.624) | (639.219.596) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 16.538.598 | 0 |
| JUMLAH ASET | | 48.718.036.951,6 | 49.042.426.049 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.12 | 0,6 | 29.516.605 |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | C.13 | 0 | 0 |
| Uang Muka dari KPPN | C.14 | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 0,6 | 29.516.605 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 0,6 | 29.516.605 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.15 | 48.718.036.951 | 49.012.909.444 |
| JUMLAH EKUITAS | | 48.718.036.951 | 49.012.909.444 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 48.718.036.952 | 49.042.426.049 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|---|---------|----------------------|------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 2.400.119.509 | 2.558.267.704 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.400.119.509 | 2.588.267.704 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 1.041.225.689 | 1.630.686.685 |
| Beban Persediaan | D.3 | 90.564.170 | 88.672.240 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 751.324.280 | 940.558.548 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 337.037.880 | 333.342.525 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 279.764.854 | 361.458.202 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7 | 740.026.262 | 649.544.077 |
| JUMLAH BEBAN | | 3.239.943.135 | 4.004.262.277 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (839.823.626) | (1.445.994.573) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | | 67.132.211 | 0 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | (1.956.650) | 8.946.431 |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.8 | 65.175.561 | 8.946.431 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (774.648.065) | (1.437.048.142) |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (774.648.065) | (1.437.048.142) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 49.012.909.444 | 48.583.110.477 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (774.648.065) | (1.437.048.142) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3 | - | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS | E.4 | - | (3.614.519.906) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | | - | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | | - | - |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | | - | (3.901.063.000) |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | | - | 286.543.094 |
| KOREKSI LAIN-LAIN | | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.5 | 479.775.572 | 5.481.367.015 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | (294.872.493) | 429.798.967 |
| EKUITAS AKHIR | E.6 | 48.718.036.951 | 49.012.909.444 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus berupaya melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan BUMN walaupun sejak berlakunya PP 33 tahun 2006, piutang negara yang berasal dari BUMN pengurusannya tidak lagi diserahkan pada PUPN/DJKN. Dalam hal pelayanan lelang, terus diupayakan penggalian potensi lelang eksekusi maupun non eksekusi sehingga lelang

dapat dijadikan sebagai salah satu sarana transaksi jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Secara umum tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

1. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan
2. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi - strategi yang harus ditempuh, yaitu:

1. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
 - 1.1. Menatausahakan kekayaan negara dan mendorong terbentuknya data base kekayaan negara yang akurat dan akuntabel
 - 1.2. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
 - 1.3. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran;

- 1.4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara dan penilaian;
 - 1.5. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset-aset *idle*;
 - 1.6. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara dan penilaian;
 - 1.7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
 - 1.8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Penilaian.
2. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.
- 2.1 Menatausahakan piutang negara dan lelang yang akuntabel dan mendorong terbentuknya data base piutang negara dan lelang yang akurat;
 - 2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang;
 - 2.3 Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
 - 2.4 Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
 - 2.5 Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
 - 2.6 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan web e-rekon-lk yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran untuk ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- d. Pengeluaran untuk ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat AsetTetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-

pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dikenakan pengurangan dana untuk penyesuaian Anggaran Belanja DJKN 2020 dalam rangka Refocusing Anggaran Penanganan COVID-19, melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

| URAIAN | 2020 | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | ANGGARAN | ANGGARAN | +/- |
| | AWAL | SETELAH REVISI | |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 1,987,922,000 | - | - |
| Jumlah Pendapatan | 1,987,922,000 | - | - |
| Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 1,946,854,000 | 1,084,014,000 | (862,840,000) |
| Belanja Barang | 1,834,979,000 | 1,753,395,000 | (81,584,000) |
| Belanja Modal | 329,649,000 | 300,200,000 | (29,449,000) |

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja Pegawai sebesar Rp862.840.000 terdiri atas pengurangan belanja gaji pokok PNS sebesar Rp552.200.000, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp80.798.000, belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp12.700.000, Belanja Tunj. Struktural PNS sebesar Rp38.340.000, Belanja Tunj. Fungsional PNS sebesar Rp8.640.000, penambahan Belanja Tunj. PPh PNS Sebesar Rp1.061.000, Belanja Tunj. Beras sebesar Rp33.850.000, Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp104.713.000, Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp22.400.000.

Terdapat penambahan pagu belanja barang yaitu Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Rp30.800.000, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp47.250.000, dan Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp33.794.000. Pengurangan pagu belanja barang terdiri dari Belanja Bahan sebesar Rp6.707.000, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp17.627.000, Belanja Langganan Listrik sebesar Rp45.600.000, Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan Rp89.331.000, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp19.225.000, Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp15.132.000. Pengurangan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp29.449.000.

Pendapatan

Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Rp75.538.505

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk Semester II Tahun Anggaran 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.466.005.883. Keseluruhan

Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| URAIAN | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 60.082.211 | 0 |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 7.050.000 | 0 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 8.406.294 | 0 |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 0 | 4.124.598 | 0 |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I | 1.039.896.000 | 1.177.637.460 | 113,25 |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian | 946.026.000 | 1.194.597.582 | 126,28 |
| Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara | 2.000.000 | 3.953.935 | 197,70 |
| Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak | 0 | 3.802 | 0,00 |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | 0 | 10.150.001 | 0,00 |
| Jumlah | 1.987.922.000 | 2.466.005.883 | 124,05 |

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2020 mengalami penurunan sebesar 49,55% dibandingkan dengan Semester II TA 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi pendapatan bea lelang oleh balai lelang atau pejabat lelang kelas I Semester II tahun 2020 mengalami penurunan dari Semester II tahun 2019 yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah kerja satker.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2019 (Rp) | 31 DESEMBER 2020 (Rp) | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Pendapatan | (964,905,326) | 478,083,883 | 1,442,989,209 | -49,55 |
| | Jumlah | (964,905,326) | 478,083,883 | 1,442,989,209 | -49,55% |

*Realisasi Belanja
Rp2.829.162.473*

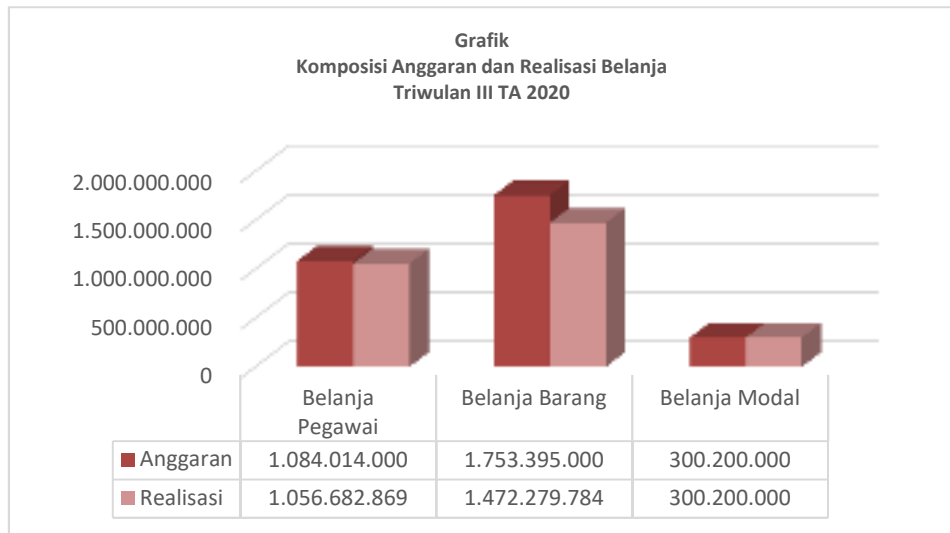
Belanja

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.829.162.473 atau sebesar 90% dari anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp3.137.609.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

| KODE JENIS BELANJA | URAIAN | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI | % |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 51 | Belanja Pegawai | 1,084,014,000 | 1,056,682,869 | 97,48% |
| 52 | Belanja Barang | 1,753,395,000 | 1,472,279,784 | 83,97% |
| 53 | Belanja Modal | 300,200,000 | 300,200,000 | 100% |
| | Jumlah | 3,137,609,000 | 2,829,162,653 | 90,2% |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Semester II Tahun Anggaran 2020 mengalami selisih kurang (penurunan) sebesar (Rp5.103.003.216) atau sebesar (64%) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Perbandingan Realisasi Belanja 2020 dan 2019

| KODE JENIS BELANJA | URAIAN | REALISASI | | NAIK/(TURUN) | |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | Rp | % |
| 51 | Belanja Pegawai | 1,056,682,689 | 1,615,229,685 | (558,546,996) | -35% |
| 52 | Belanja Barang | 1,472,279,784 | 1,662,755,057 | (190,475,273) | -11% |
| 53 | Belanja Modal | 300,200,000 | 4,654,180,947 | (4,353,980,947) | -94% |
| | Jumlah | 2,829,162,473 | 7,932,165,689 | (5,103,003,216) | -64% |

Belanja Pegawai
Rp1.056.682.689

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.682.689 dan Rp1.677.727. Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II Tahun 2020 mengalami penurunan (35%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS | 743.543.700 | 1.167.788.596 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 11.476 | 20.014 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 49.552.980 | 72.019.310 |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 14.832.630 | 23.695.876 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 54.900.000 | 71.100.000 |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 6.480.000 | - |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 1.200.963 | 985.105 |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 35.196.120 | 58.008.420 |
| Belanja Uang Makan PNS | 126.225.000 | 173.233.000 |
| Belanja Tunjangan Umum PNS | 24.740.000 | 48.380.000 |
| Belanja Uang Lembur | - | - |
| Realisasi Belanja Bruto | 1.056.682.869 | 1.615.230.321 |
| <i>Pengembalian Belanja</i> | - | - |
| Realisasi Belanja Netto | 1.056.682.869 | 1.615.230.321 |

Belanja Barang
Rp1.472.279.784

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.472.279.784 dan Rp1.662.755.057 Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar (11.46%) dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya. Seperti misalnya perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan pembinaan. Hal tersebut tentu berimbas pada penyerapan anggaran Belanja Barang di Semester II tahun 2020.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK/(TURUN) | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Keperluan Perkantoran | 397,372,201 | 375,167,252 | 22,204,949 | 5.92% |
| Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 953,500 | - | 953,500 | 0.00% |
| Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 15,283,680 | 76,084,580 | (60,800,900) | -79.91% |
| Belanja Honor Operasional Satker | 136,620,000 | 167,880,000 | (31,260,000) | -18.62% |
| Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi | 30,303,778 | - | 30,303,778 | 0.00% |
| Belanja Bahan | 7,171,500 | 99,500,000 | (92,328,500) | -92.79% |
| Belanja Honor Output Kegiatan | 6,750,000 | 21,900,000 | (15,150,000) | -69.18% |
| Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 0 | 22,342,757 | 0 | 0.00% |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 101,386,750 | 81,301,782 | 20,084,968 | 24.70% |
| Belanja Langganan Listrik | 100,786,548 | 113,313,371 | (12,526,823) | -11.06% |
| Belanja Langganan Telepon | 11,599,093 | 10,464,588 | 1,134,505 | 10.84% |
| Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 | 47,250,000 | - | 47,250,000 | 0 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 221,465,640 | 222,334,000 | (868,360) | -0.39% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 115,572,240 | 111,008,525 | 4,563,715 | 4.11% |
| Belanja Perjalanan Biasa | 248,364,854 | 343,498,202 | (95,133,348) | -27.70% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31,400,000 | 17,960,000 | 13,440,000 | 74.83% |
| Realisasi Belanja Bruto | 1,472,279,784 | 1,662,755,057 | (190,475,273) | -11.46% |
| <i>Pengembalian Belanja</i> | | | 0 | |
| Realisasi Belanja Netto | 1,472,279,784 | 1,662,755,057 | (190,475,273) | -11.46% |

Belanja Modal
Rp300.200.000

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp300.200.000 sedangkan pada 31 Desember 2019 realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.654.180.947. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (93,5%). Hal ini disebabkan adanya penghematan yang dilakukan karena mewabahnya Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2020, Belanja Renovasi Rumah Dinas sudah selesai dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0 | 3,389,559,730 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300,200,000 | 1,264,621,217 | -76% |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan | - | - | |
| Jumlah Belanja | 300,200,000 | 4,654,180,947 | -93.55% |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp1.245.837*

C.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.245.837 dan Rp0. Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Pada tahun 2020, kebijakan yang diambil adalah dengan menurunkan nominal Uang Persediaan agar proses *revolving* dapat rutin dilaksanakan.

*Kas lainnya dan setara
kas Rp0,6*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,6 dan Rp11.293.585.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawa tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Persediaan
Rp38.516.769*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp38.516.769 dan Rp29.650.839.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

| Persediaan | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Barang Konsumsi | 38,516,769 | 29,650,839 |
| Jumlah | 38,516,769 | 29,650,839 |

Tanah
Rp37.936.460.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama, yaitu sebesar Rp37.936.460.000.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

| No | Luas | Lokasi | Nilai |
|---------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 5847 m2 | Jl. S. Parman , Palu | 19.011.571.000 |
| 2 | 3530 m2 | Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 , Palu | 16.865.672.000 |
| 3 | 814 m2 | Jl. D.I Panjaitan | 2.059.217.000 |
| Jumlah | | | 37.936.460.000 |

Peralatan dan Mesin
Rp4.309.319.172

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp4.309.319.172 dan Rp5.251.053.810.

Gedung dan Bangunan
Rp9.764.137.730

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp9.764.137.730. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp324.878.000

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp324.878.000. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp4.940.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.940.000 dan Rp4.940.000. Tidak terdapat mutasi

tambah ataupun kurang terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp3.677.999.155)*

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp3.677.999.155) dan (Rp4.279.987.915). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Gedung dan Bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | 31 DESEMBER 2020 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 2,694,204,121 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 861,041,148 |
| 3 | Jalan dan Jembatan | 117,982,636 |
| 4 | Jaringan | 4,771,250 |
| Akumulasi Penyusutan | | 3,677,999,155 |

*Aset Lain-Lain
Rp1.210.393.222*

C.10 Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp1.210.393.222 dan Rp639.219.596. Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp1.193.854.624)*

C.11 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp1.193.854.624) dan (Rp639.219.596). Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp0,6*

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,6 dan Rp29.516.605. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.14 Uang Muka dari KPPN

Penarikan dan pengembalian dana UP /TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP /TUP oleh Satker (SP2D) UP / TUP dicatat oleh Kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUN juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN). Dengan demikian nilai Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sejumlah kas di bendahara pengeluaran pada periode yang sama yaitu Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas
Rp48.718.036.951*

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp48.718.036.951 dan Rp49.012.909.444. Ekuitas adalah Kekayaan Bersih Entitas yang merupakan Selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2.466.005.883*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.466.005.883 dan Rp2.558.267.704. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | 31 DESEMBER 2019 (Rp) | 31 DESEMBER 2020 (Rp) | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | Gedung, dan Bangunan (423131) | 12.928.586 | 8.406.294 | (4.522.292) | -0,3497901 |
| 2 | Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) | - | 7.050.000 | 7.050.000 | #DIV/0! |
| 3 | Penjualan Peralatan dan Mesin | - | 60.082.211 | 60.082.211 | #DIV/0! |
| 4 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 2.998.994 | 4.124.598 | 1.125.604 | 0,37532719 |
| 5 | Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (425782) | 631.677.682 | 1.177.637.460 | 545.959.778 | 0,8643012 |
| 6 | Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784) | 1.705.710.170 | 1.194.597.582 | (511.112.588) | -0,299648 |
| 7 | Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785) | 12.326.408 | 3.953.935 | (8.372.473) | -0,6792306 |
| 8 | Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak (425995) | 20.004 | 3.802 | (16.202) | -0,809938 |
| 9 | Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) | 1.700 | 10.150.001 | 10.148.301 | 5969,58882 |
| 10 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) | 41.544.160 | - | (41.544.160) | -1 |
| 11 | Pendapatan Jasa Lainnya (425699) | 151.060.000 | - | (151.060.000) | -1 |
| | Jumlah | 2.558.267.704,00 | 2.466.005.883,00 | (92.261.821) | 96,39% |

*Beban Pegawai
Rp1.056.682.689*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.682.689 dan Rp1.630.686.685. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | (Rp) | % |
| Beban Gaji Pokok PNS | 743.543.700 | 1.167.788.596 | (424.244.896) | -36,33% |
| Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS | - | - | - | 0,00% |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 11.476 | 19.378 | (7.902) | -40,78% |
| Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS | - | - | - | 0,00% |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 49.552.980 | 72.019.310 | (22.466.330) | -31,19% |
| Pengembalian Belanja Beban Tunj. Suami/Istri PNS | - | - | - | 0,00% |
| Beban Tunj. Anak PNS | 14.832.630 | 23.695.876 | (8.863.246) | -37,40% |
| BebanTunj. Struktural PNS | 54.900.000 | 71.100.000 | (16.200.000) | -22,78% |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 6.480.000 | - | 6.480.000 | 0,00% |
| Beban Tunj. PPh PNS | 1.200.963 | 985.105 | 215.858 | 21,91% |
| Beban Tunj. Beras PNS | 35.196.120 | 58.008.420 | (22.812.300) | -39,33% |
| Beban Uang Makan PNS | 126.225.000 | 188.690.000 | (62.465.000) | -33,10% |
| Pengembalian Beban Uang Makan PNS | - | - | - | 0,00% |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 24.740.000 | 48.380.000 | (23.640.000) | -48,86% |
| Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS | - | - | - | 0,00% |
| Beban Uang Lembur | - | - | - | 0,00% |
| Jumlah | 1.056.682.869 | 1.630.686.685 | (574.003.816) | -35,20% |

Beban Persediaan
Rp90.564.170

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp90.564.170 dan Rp88.672.240. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 90,564,170 | 88,672,240 |
| Jumlah Beban Persediaan | 90,564,170 | 88,672,240 |

Beban Barang dan
Jasa
Rp751.324.280

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp751.324.280 dan Rp940.558.548. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK (TURUN) % |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | % |
| Beban Keperluan Perkantoran | 396,772,201 | 375,767,252 | 5.59% |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 953,500 | - | 0.00% |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 13,117,660 | 78,250,600 | -83.24% |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 136,620,000 | 167,880,000 | -18.62% |
| Beban Barang Operasional Lainnya | - | 22,342,757 | 0.00% |
| Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 30,303,778 | - | 0.00% |
| Beban Bahan | 7,171,500 | 99,500,000 | -92.79% |
| Beban Honor Output Kegiatan | 6,750,000 | 21,900,000 | -69.18% |
| Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi | - | - | 0.00% |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | - | - | 0.00% |
| Beban Langganan Telepon | 11,599,093 | 10,464,588 | 10.84% |
| Beban Langganan Listrik | 100,786,548 | 113,313,371 | -11.06% |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin | - | 51,139,980 | |
| Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 | 47,250,000 | - | 0.00% |
| Jumlah | 751,324,280 | 940,558,548 | -20.12% |

Terdapat penambahan anggaran yang dialokasikan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.800.000 pada akun 521311 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dan sebesar Rp47.250.000 pada akun 522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 . Anggaran tersebut terserap sebesar Rp78.050.000 untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020.

Beban
Pemeliharaan
Rp337.037.880

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp337.037.880 dan Rp333.342.525. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 115,572,240 | 111,008,525 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 221,465,640 | 222,334,000 |
| Jumlah | 337,037,880 | 333,342,525 |

Beban Perjalanan
Dinas
Rp279.764.854

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp279.764.854 dan Rp361.458.202. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 248,364,854 | 343,498,202 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31,400,000 | 17,960,000 |
| Jumlah | 279,764,854 | 361,458,202 |

Terjadi penurunan perjalanan dinas pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang menyebabkan rencana kerja / perjalanan dinas mulai bulan Maret 2020 tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp740.026.262

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp740.026.262 dan Rp649.544.077. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | % |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 542,556,655 | 461,777,813 | 17% |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 153,771,791 | 152,980,881 | 1% |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 33,831,591 | 33,831,591 | 0% |
| Beban Penyusutan Jaringan | 477,125 | 477,126 | 0% |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | 9,389,100 | 476,666 | 1870% |
| Jumlah Penyusutan | 740,026,262 | 649,544,077 | 14% |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 740,026,262 | 649,544,077 | 14% |

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp65.175.561

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | NAIK |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | % |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 2,072,150 | 11,920,218 | -83% |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 115,500 | 20,866,649 | -99% |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | - 1,956,650 | 8,946,431 | -122% |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | 67,132,211 | - | 0% |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 65,175,561 | 8,946,431 | 629% |

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp49.012.909.444

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.012.909.444 dan Rp48.583.110.477.

Surplus/(Defisit) LO

(Rp774.684.065)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp774.684.065) dan (Rp1.437.048.142) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan*

Kebijakan

Akuntansi /

Kesalahan

Mendasar

Rp -

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Koreksi yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp0

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.303.000 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp -

Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp479.775.572*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp479.775.572 dan Rp5.481.367.015. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas | Nilai | |
|--|--------------------|----------------------|
| | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
| Diterima dari Entitas Lain | 479,775,572 | 5,481,367,015 |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | | |
| Transfer Masuk | - | - |
| Transfer Keluar | - | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - | - |
| Jumlah | 479,775,572 | 5,481,367,015 |

*Ekuitas Akhir
Rp48.718.036.951*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp48.718.036.951 dan Rp49.012.909.444.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dilaksanakan Uji Coba (*Piloting*) Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran atas Gaji (berserta tunjangan yang melekat), Gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur.

Adapun waktu pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu adalah Tahap III pada bulan Oktober 2020, yang kemudian akan diimplementasikan secara penuh mulai tahun anggaran 2021. Oleh sebab itu, pada bulan Juli 2020, Kantor Pusat DJKN telah mulai menarik anggaran belanja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu sebesar Rp862.840.000. Prognosa kebutuhan belanja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu sampai dengan September 2020 sudah disampaikan, dan apabila masih ada sisa pada akhir tahun, akan dilakukan revisi anggaran guna menarik dana tersebut.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Adanya Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia mengakibatkan Penyerapan Anggaran tidak maksimal dikarenakan tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada bulan Maret s.d. Juni 2020 khususnya kegiatan perjalanan dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND-507/SJ/2020 tanggal 22 April 2020 dan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-202/KN/2020 tanggal 26 April 2020 hal Penyesuaian Anggaran Belanja DJKN 2020 Dalam Rangka *Refocusing Anggaran Penanganan COVID-19*, dimana terdapat penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga tahun 2020 yang bersumber dari :

- a. Belanja modal (Non LMAN) untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak terhambat akibat terjadinya Pandemi Covid 2019, yang dapat ditunda ke dan yang dapat diperpanjang waktu penyelesaiannya menjadi multi years;

- b. Belanja barang Birokrasi (Non LMAN) yang terdiri dari perjalanan dinas (sesuai tusi, mutasi, diklat, luar negeri), biaya rapat (dalam kantor, konsinyering/paket meeting dalam dan luar kota), honorarium jasa profesi, dan belanja barang non operasional lainnya yang akan terkendala dalam penyerapan akibat adanya pandemik covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya.

Sesuai surat tersebut diatas, jumlah porsi penyesuaian/penghematan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu TA 2020 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN sebesar :

| Uraian | 2020 | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH REVISI | +/- |
| Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 1.946.854.000 | 1.084.014.000 | (862.840.000) |
| Belanja Barang | 1.834.979.000 | 1.753.395.000 | (81.584.000) |
| Belanja Modal | 329.649.000 | 300.200.000 | (29.449.000) |
| Jumlah Belanja | 4.111.482.000 | 3.137.609.000 | -973.873.000 |

Dalam melakukan Revisi Anggaran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-3/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran, serta menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran dan outstanding kontrak TA 2020 sampai dengan periode terakhir agar tidak terjadi pagu minus.

Selain adanya penyesuaian/penghematan belanja diatas, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, dimana telah ditetapkan beberapa akun belanja khusus penanganan COVID-19, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu telah melakukan penambahan akun khusus COVID-19 pada Output Layanan Perkantoran: sebesar Rp16.382.000 dengan detail Akun 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 dan pada detail Akun 522192 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp9.300.000. Namun, tidak menutup

kemungkinan anggaran untuk COVID-19 tersebut akan bertambah/berkurang sesuai kebutuhan organisasi kedepannya.